



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian, 1980, *Memahami Strategi dan Proses Pembangunan Nasional*, Leknas LIPI, Jakarta.
- Amirin, Tatang M, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta.
- A.R., Mustopadidjaja, 2012, *Bappenas dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede “Membangun Hukum Indonesia: Paradigma Pancasila”, dalam Tim Penulis, 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Setara Press, Malang.
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Coleman, Jules L, “The Architecture of Jurisprudence”, dalam Jordi Ferrer dkk, 2012, *Neutrality and Theory of Law*, Springer Dordrecht Heidelberg, New York.
- Conyers, D., 1994, *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1965, *20 Tahun Indonesia Merdeka Jilid I*, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ekatjahjana, Widodo dan Totok Sudaryanto, 2001, *Sumber Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Fajar, Abdul Muhktie, “Perjuangan untuk Sebuah Negara Hukum yang Bermartabat”, dalam Tim Penulis, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, 2013, Setara Press, Malang.



- Ghoffar, Abdul, 2009, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana, Jakarta.
- Hakim, Lukman, “Kerangka Politik Hukum Indonesia”, dalam Tim Penulis, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, 2013, Setara Press, Malang.
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- Hardjanto, Imam, 2011, *Teori Pembangunan*, UB Press, Malang.
- Indrati, Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- H.R., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I: Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jasin, Johan, 2014, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman, 2016, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Kansil, C.S.T. 1970, *Inti Pengetahuan Repelita*, Erlangga, Jakarta.
- K.S, Jomo dan Shamsulbahriah Ku Ahmad, 2004, *Teori Pembangunan Ekonomi*, Utusan Publications, Kuala Lumpur.
- Latif, Abdul dan Hasbi Ali, 2011, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1992, *Serba-Serbi Politik Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Abdul, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Manan, Bagir, 2006, *Lembaga Kepresidenan*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.



- Mertokusumo, Sudikno, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma, Yogyakarta.
- Moeljarto, 1995, *Politik Pembangunan*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Moerdiono, "Sekitar Politik dan Strategi Pembangunan Hukum Nasional", dalam Moh Busyiro Muqoddas dkk, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta.
- MD, Mahfud. 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konsitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- MD, Mahfud, 2011, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Nain, Ahmad Shikri Mohd dan Rosman Md. Yusoff, 2003, Konsep, Teori, Dimensi, dan Isu Pembangunan, Universiti Tekonologi Malaysia, Malaysia.
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon, 2013, *Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudarmanto, J.B., 2011, *Politik Bermartabat: Biografi I.J. Kasimo*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sumawita, Sarbini, 2004, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suryono, Agus, 2010, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*, UB Press, Malang
- Setiyono, Budi dan Bonnie Triyana (ed), 2014, *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawakarsa*, Serambi, Jakarta.
- Soehino, 2008, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.



- Siagian, Sondang, 2012, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I Jenis, Fungsi, Materi Muatan*, Kanisius. Yogyakarta.
- Redaksi Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1991, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, PT. Cipta Adhi Persada, Jakarta.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, 2006, *Pembangunan Ekonomi Jilid I*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Merle Calvin Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern*, Penerbit Serambi, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, "Asas Hukum dan Perwujudannya dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Moh Busyiro Muqoddas dkk, 1992, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, UII Press, Yogyakarta

Jurnal, Makalah, dan Pidato

- Anwar, Arman, "Tidak Perlu Menghadirkan Kembali GBHN", *Makalah*, Workshop Pancasila Konstitusi dan Ketatanegaraan Penataan Sistem Ketatanegaraan, Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN, Ambon, 21-22 Oktober 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945", *Makalah*, disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh BPHN Depkumham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Atok, A. Rosyid Al, "Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Makalah*, Disampaikan dalam acara *Focus Group Discussion (FGD)* Pusat Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Pancasila d.h Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, 3 Mei 2016.
- Bahaudin, "Menghidupkan Kembali GBHN: Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan", *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume III, Nomor 1, Mei 2017.
- Irwandi, "Kedudukan TAP MPR dan Implikasinya terhadap Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia", *Jurnal Inovatif*, Volume 6, Nomor 2, Maret 2016.
- Lukman Hakim, "Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No.1, Juni 2011.



- Hakim, Abdul, “Perbandingann Perekonomian dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono”, *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, Volume 03 Nomor 2, Bulan Juli, Tahun 2012.
- Hendra, “Pertanggungjawaban Politik Presiden Pasca Amandemen UUD 1945”, *Jurnal Wacana Politik*, Volume 1, Nomor 1, Maret 2016.
- MD, Moh Mahfud, “Politik Hukum Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen yang diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 29-31 Mei 2006.
- Nurbaningsih, Enny, “Rule of Law dan Perkembangannya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Pidato*, disampaikan pada Diskusi Publik Bertema Rule of Law in Indonesia yang diselenggarakan oleh World Justice Project, tanggal 19 Januari 2015.
- Rahmatunnisa, Mudiwati, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)”, *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Reformulasi Model GBHN: Tinjauan Terhadap Peran dan Fungsi MPR RI dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Kerjasama MPR dengan Universitas Padjadjaran, Cihampelas, Kamis 25 April 2013.
- Sarwanto, Eddy, “Dasar Hukum dan Kedudukan Maklumat Wakil Presiden No.X/1945 dan Maklumat Pemerintah 14 Nopember TH. 1945”, *Makalah*, disampaikan dalam Diskusi Ilmiah Fakultas Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, 28 November 1986.
- Subkhan, Imam “GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia”, *Jurnal Aspirasi*, Volume 5, Nomor 2, Desember 2014.
- Sukma, Novira Maharani, “Sinkronisasi Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dengan Sistem Presidensial”, *Jurnal Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor 2, September 2017.
- Susanto, Mei, “Wacana Menghidupkan Kembali Gbhn Dalam Sistem Presidensial Indonesia (*The Discourses Revive The DPSP In The Presidential System Of Indonesia*)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Volume 17, Nomor 3, September 2017.
- Supriyono, H.M, “Pemikiran Soekarno Perihal Ekonomi”, *Makalah*, Disampaikan pada forum fiskrusi Pembaca Aktif Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Universitasl Islam Blitar, tanggal 3 September 2014.



Tohadi, “Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Reformulasi Penyusunan RPJP Nasional dan RPJM Nasional atau Revitalisasi GBHN?”, *Makalah*, Disampaikan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Mencari Format Revitalisasi GBHN Pasca Perubahan UUD 1945 oleh Departemen Kaderisasi Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan Pusat Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) di Jakarta, tanggal 11 Juni 2015.

Wicaksono, Dian Agung, “Implikasi Re-Eksistensi TAP MPR dalam Hierarki peraturan perundang- Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1, Maret 2013.

Surat Kabar

Faiz, Pan Mohammad, “GBHN dan Haluan Ketatanegaraan”, *Koran Sindo*, 27 April 2016.

Isra, Saldi, “Wacana Menghidupkan GBHN”, *Kompas*, 12 Januari 2016.

Isra, Saldi, “GBHN dan Perubahan Konstitusi”, *Kompas*, 23 Agustus 2016.

Tesis

Hudi, Moh, 2018, *Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia

Internet

Admin, “FRI Upayakan Revitalisasi GBHN”, <https://uns.ac.id/id/uns-update/fri-upayakan-revitalisasi-gbhn-2.html>, diakses tanggal 15 Mei 2018.

Aidit, D.N., “Selamatkan Dekon”, <https://www.marxists.org/indonesia/indones/1963-SelamatkanDekon.htm>, diakses tanggal 18 Januari 2019.

Asshiddiqie, Jimly, “Pembangunan Nasional Berparadigma Hukum”, www.jimly.com/pemikiran/view/19, diakses tanggal 10 Mei 2018.

Bratakusumah, Deddy Supriady “Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”, <https://www.bappenas.go.id/files/6313/5211/1136/dedy2009101509571322950.doc>, diakses tanggal 13 Desember 2017.

DPD RI, “Komite IV DPD RI Mengumpulkan Usulan Strategis Seluruh Provinsi”, <http://www.dpd.go.id/artikel-858-komite-iv-dpd-ri-mengumpulkan-usulan-strategis-seluruh-provinsi>, diakses tanggal 18 November 2018.



- DPD RI, "RKP versi Komite IV DPD Memuat Pembangunan Nasional Berdimensi Kewilayahan " <http://www.dpd.go.id/artikel-465-rkp-versi-komite-iv-dpd-memuat-pembangunan-nasional-berdimensi-kewilayahan>, diakses tanggal 18 November 2018.
- Haryatmoko, "Hukum dan Moral dalam Masyarakat Majemuk", http://www.secapramana.com/artikel/hukum_moral_dlm_masyarakat_majemuk.htm , diakses tanggal 23 Desember 2017.
- Kementerian Keuangan RI, "Data Pokok APBN 2008-2013", <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/Data%20Pokok%20APBN%202013.pdf>, diakses tanggal 3 September 2018.
- Kementerian Keuangan RI, "Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi", <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1012>, diakses tanggal 3 September 2018.
- Kementerian Perindustrian RI, "Pemerintah Kaji Ulang Sejumlah Proyek MP3EI", <http://www.kemenperin.go.id/artikel/10288/Pemerintah-Kaji-Ulang-Sejumlah-Proyek-MP3EI>, diakses tanggal 18 November 2017.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, "Sejarah Singkat Bappenas", <https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/sejarah>, diakses tanggal 20 Januari 2019.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, "2 Tahun Kerja Nyata Jokowi-JK", <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/KSP%202020Tahun%20Jokowi%20JK.pdf>, diakses tanggal 15 Mei 2018.
- Nugroho, Kuku Bhimo "Perang" Jokowi Versus SBY di Infrastruktur", <https://tirto.id/perang-jokowi-versus-sby-di-infrastruktur-bnQH>, diakses tanggal 15 Mei 2018.
- Oxford English Living Dictionaries, "Rechtsstaat", <https://en.oxforddictionaries.com/definition/rechtsstaat>, diakses 16 Mei 2018.
- Ratnaningsih, Erna, "Perbedaan Tujuan Dan Arah Pembangunan Hukum Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945", <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/perbedaan-tujuan-dan-arah-pembangunan-hukum-nasional-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945> , diakses tanggal 2 Oktober 2018.
- Sari, Elisa Valenta "Jokowi Ganti Istilah MP3EI Karena Berbau Politis", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20141218132635-92-19063/jokowi-ganti-istilah-mp3ei-karena-berbau-politis/>, diakses tanggal 19 November 2017.



Sugiarto, Laga, “Perdebatan Ketetapan MPR/S tentang Haluan Negara dan Pengujiannya”,

http://unnes.academia.edu/lagasugiarto/17587267/PERDEBATAN_KETETAPAN_MPR_S_TENTANG_HALUAN_NEGARA_DAN_PENGUJIANNYA_A, diakses tanggal 5 Oktober 2018.

Rahardjo, Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

Ratnaningsih, Erna, “Perbedaan Tujuan dan Arah Pembangunan Hukum Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945”, <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/perbedaan-tujuan-dan-arrah-pembangunan-hukum-nasional-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945/> , diakses tanggal 23 November 2017.

Ratnaningsih, Erna, “Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Paska Amendemen Konstitusi”, <http://business-law.binus.ac.id/2017/08/27/perbedaan-tujuan-dan-arrah-pembangunan-hukum-nasional-sebelum-dan-sesudah-amandemen-uud-1945/>, diakses tanggal 23 November 2017.

THEE Kian Wie Economic Research Centre, “State And Economy In Indonesia’s Transformation To Sovereignty: A Comparison With The Philippines, Singapore, South Korea And Taiwan”, <https://crawford.anu.edu.au/acde/ip/pdf/seminars/20120919-ppt-paper.pdf>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

The Law Dictionary, “Rule of Law”, <https://thelawdictionary.org/rule-of-law/>, diakses tanggal 16 Mei 2018

Wiwoho, Bimo “Megawati Wacanakan Kembali GBHN Kekinian”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180308135754-32-281447/megawati-wacanakan-kembali-gbhn-kekinian>, diakses tanggal 15 Mei 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Tap. MPRS No IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara Dan Haluan Pembangunan.



Ketetapan Tap. MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang Prinsip-Prinsip Musyawarah untuk Mufakat dalam Demokrasi Terpimpin sebagai Pedoman Bagi Lembaga-Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XVI/MPRS/1966 tentang Pengertian Mandataris MPR.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/1973 Tentang Peraturan Tata-Tertib Mejelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : I/MPR/1973 Tentang Peraturan Tata-Tertib Mejelis Permusyawaratan Rakyat.

Undang-undang Nr. 7 Tahun 1950, tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional (Lembaran Negara Nomor 144 Tahun 1958 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1675).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1700).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1952 Tentang Dewan Perancang Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi Dan Pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat. Nr. 48 Tahun 1950 tentang mengumumkan Piagam Penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009.



- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.
- Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) 1989/90 - 1993/94.
- Keputusan Presiden Nomor 319 Tahun 1968 tentang Rentjana Pembangunan Lima Tahun.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II) 1974/75 - 1978/79.
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita III) 1979/80 - 1983/84.
- Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (REPELITA IV) 1984/85 - 1988/89.
- Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) 1989/90 - 1993/94.



Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) 1994/95 - 1998/99.

Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1947 tentang Pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.